

PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR

Nurisneni^{1*}, Nasrul Haq², Ansyari Mone¹

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the involvement of participatory governance in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Sanrobone district, Takalar Regency. This study qualitative research, that provided a general picture as a kind of data collected objectively from the field with a type of phenomenology. Data collection techniques were observation, interviews with a number of informants. Data analysis used qualitative data. The results of this study showed that participatory governance in development planning deliberations in the district of Sanrobone Takalar Regency. Some had been realized optimally in accordance with their objectives, this was seen from the indicator (1) the involvement of direct community participation had been directly involved in musrenbang activities (2) musrenbang activities were still some communities that did not directly involve in development activities due to several constraints / obstacle (3) the community was very auntsian in attending Musrenbang activities (4) many people gave ideas or advices for the smoothness of musrenbang (5) people hoped to be responsible and participate in the implementation of musrenbang activities.

Keywords: *participation involvement, participation rate*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan dan keterlibatan *participatory governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan sanrobone kabupaten takalar. Sebagian telah terealisasi secara optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini di lihat dari indicator (1) keterlibatan partisipasi langsung masyarakat telah terlibat langsung dalam kegiatan musrenbang (2) kegiatan musrenbang masih ada beberapa masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan musrenbang di sebabkan oleh beberapa kendala/halangan (3) tmasyarakat sangat auntsian dalam menghadiri kegiatan Musrenbang (4) masyarakat banyak memberikan ide atau sarnnya untuk kelancaran musrenbang (5) masyarakat bersedia bertanggung jawab dan ikut serta terselenggaranya kegiatan musrenbang.

Kata Kunci: keterlibatan partisipasi, tingkat partisipasi

* nurisneni@gmail.com

PENDAHULUAN

Reformasi pemerintahan di Indonesia telah mengubah pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dari paradigma sentralistis ke desentralisasi yang ditandai dengan otonomi daerah atau penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih minim karena masyarakat kurang memahami peran yang dimiliki dalam program pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan desa selama ini cenderung masih di dominasi oleh hasil kerja dari pemerintah semata. Padahal dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 telah memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam proses pembangunan, masyarakat seharusnya terlibat karena salah satu indikator penentu keberhasilan program yaitu adanya partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Azhar (2015:63) bahwa proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat operasional

dalam sistem birokrasi pemerintahan. Pemberian otonomi tersebut di maksudkan untuk menumbuh kembangkan daerah pada berbagai bidang, demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan, terwujudnya kemandirian pada daerah, meningkatkan kemampuan daerah dalam bersaing menuju proses pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Berkurangnya peranan pemerintah pusat dan provinsi di era otonomi daerah, sebagaimana otonomi luas berada di daerah kabupaten atau kota telah menjadikan daerah kabupaten dan kota memiliki peran yang cukup besar untuk menata proses pembangunan sesuai kehendak masyarakat, melalui partisipasi dari bawah (*bottom-up strategy participation*) sebagaimana program-program kegiatan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan lebih menitikberatkan kepada keterlibatan masyarakat local untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini di terapkan dapat bermanfaat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan sebagai mobilisasi dana.

Bentuk dari desentralisasi tersebut adalah salah satunya melalui kebijakan perencanaan yang merupakan langkah awal proses pembangunan. Proses desentralisasi akan menciptakan masyarakat demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif dan inisiatif, yang merupakan tuntutan dari globalisasi yang begitu cepat untuk merubah pemikiran dan perilaku saat ini dengan inovasi teknologi informasi. Dengan demikian, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi saat ini, tidak berhenti hanya pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melainkan pemerintah daerah ikut juga menyerahkan kewenangannya kepada masyarakat lewat berbagai tahapan.

Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan daerah dengan sektor swasta. Maka untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, segala aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah yang nantinya akan memanfaatkan dan

menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih minim karena masyarakat kurang memahami peran yang dimiliki dalam program pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan desa selama ini cenderung masih di dominasi oleh hasil kerja dari pemerintah semata. Padahal dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 telah memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam proses pembangunan, masyarakat seharusnya terlibat karena salah satu indikator penentu keberhasilan program yaitu adanya partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Azhar (2015:63) bahwa proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat di karenakan kurangnya ruang masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu perlu adanya forum yang di peruntukkan bagi masyarakat yaitu forum musyawarah perencanaan pembangunan, di mana masyarakat dapat menyampaikan

aspirasinya dalam rangka merencanakan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan diskripsi di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Participatory Governance* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Partisipasi menurut Mappamiring, (2011) adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan di antara *stakeholders* yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan mengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Secara sederhana partisipasi dapat di maknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*.”

Akhmad Sukardi, (2009) partisipasi mempunyai makna yang luas, menganalisis partisipasi harus sesuai dengan konteks dimana partisipasi itu di hubungkan dan pada tingkatan mana partisipasi akan di analisis. Yang termasuk aspek partisipasi adalah bidang dan tsahapan partisipasi warga, seperti bidang perencanaan, penganggaran atau pada tahap monitoring dan evaluasi atau bahkan pada semua tahapan tersebut. Yang dimaksudkan darajat partisipasi

adalah kualitas atau bobot partisipasi pada masing-masing tahapan proses. Sedangkan tingkatan partisipasi adalah ruang lingkup partisipasi itu berlangsung apakah di tingkat lokal, provinsi, nasioanal atau global.

Menurut Sundariningrum dalam sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan keterlibatannya, yaitu: (1) Partisipasi langsung ini terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orng mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya, (2) artisipasi tidak langsung ini terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Perencanaan pembangunan partisipatif menurut Hanif Nurcholis, (2008) adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggondongan (konversi), ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi.

Hal ini tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang diperolehnya pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat partisipasi menurut Isbandi, (2007) yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga yang mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah public. Dalam *governance*, pemerintahan yang menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi actor yang paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif

melakukan upaya tersebut (Tjahjanulin,2011).

Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya dan dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat, Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan public yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan tata kelola pemerintah mensyaratkan keterlibatan masyarakat dan organisasinya sebagai kekuatan pengembang negara. Tata kelola pemerintah dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat mengembangkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas (Juanda Nawawi,2012).

Kini *governance* tak lagi dianggap memadai karena pengaruh globalisasi yang sedemikian kuat menyebabkan ada banyak kebutuhan dan tuntutan public yang tak lagi dipenuhi. Untuk itu dibutuhkan cara baru untuk memenuhi persoalan tersebut yang kemudian dikenal sebagai

governance. Globalisasi juga membawa kompleksitas dinamis bagi administrasi publik sehingga persoalan dan kebutuhan yang ada hanya akan dicapai dengan adanya inovasi dalam kebijakan dan administrasi publik. Inovasi merupakan kunci utama *governance* dalam mencapai tujuan administrasi (Tjahnulin, 2011).

Pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa meskipun konsep *governance* masih mengacu pada aspek kekuasaan, tetapi spektrumnya sudah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi terpusat pada tangan pemerintah semata, tetapi bergeser dan terdistribusi secara merata pada *stakeholder* dalam konsep masyarakat madani, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (Akhmad Sukardi, 2009).

Participatory governance menurut Muluk (2005:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah adalah melindungi setiap masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota-anggota masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Selanjutnya Musgrave dan Musgrave (1991) dalam Muluk (2005:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi yang menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan

mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods* atau mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat di pergunakan baik sebagai *private* maupun *public goods* dan menentukan komposisi dari *public goods*.

Fung dan Wright (Nasarani, 2014:8) menyatakan bahwa Pemerintahan partisipatif merupakan pemberdayaan kumpulan orang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang masuk akal melalui musyawarah dan diskusi. Pemberdayaan pemerintahan partisipatif memiliki nilai-nilai konseptual yang meliputi partisipasi, musyawarah dan kelayakan.

Musyawarah menurut bahasa berarti berunding dan berembuk, sedangkan pengertian musyawarah menurut istilah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah di sepakati dalam memecahkan suatu masalah (Ricky,2015)

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah, konflik dan juga problem di masyarakat. Kata Musrembang identik dengan diskusi di masyarakat tentang kebutuhan

pembangunan daerah. Musrembang adalah mekanisme perencanaan sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (*Bottom Up Planning*) dengan apa yang akan di program pemerintah (*Top Down Planning*) Iskandar, 2010.

Pelaksanaan Musrembang yang berjenjang mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga di bawa ketingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas, dan masih terbatas pada seremonial dan cara rutin belaka. Peran lembaga daerah dalam hal ini pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrembang mutlak di perlakukan sebagai salah satu usaha menuju pemerintahan daerah yang lebih baik (Wahyu Ishardino Satries, 2010).

Kegiatan Musrembang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan akan dilaksanakan. Musrembang harus dipandang sebagai saluran resmi yang di persiapkan untuk

menganalisis aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Musrembang hendaknya dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk melakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kutub perencanaan tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat turut mewarnai hasil perencanaan teknoratis dan perencanaan politis. Musrembang adalah forum public perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga public yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan penyelenggaraan musrembang merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Nanda, 2014).

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) merupakan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Penyelenggaraan Musrembang merupakan salah satu tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembanguna tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata

pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrembang juga merupakan forum pendidikan bagi warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan (Dila, 2012).

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan atau desa, kecamatan atau kota, hingga tingkat provinsi dan pusat atau nasional. Adapun alur proses kegiatan musrembang yaitu tahapan persiapan, tahapan pra musrembang, dan tahapan pelaksanaan sehingga sampai menetapkan waktu dan tempat (Ricky, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan sanrobone. Sumber data yang di peroleh dalam penulisan ini adalah data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung pada informan. Adapun yang menjadi

informan adalah camat, seksi pembangunan, perwakilan BPD, tokoh agama, dan masyarakat di kecamatan sanrobone kabupaten takalar.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku, dokumen – dokumen, tulisan – tulisan ilmiah dari berbagai media, dan arsip – arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. di dalam pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan dalam menganalisis data menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga trigulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanrobone sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelah utara dan berjarak kurang lebih 12 KM dari ibu kota Kabupaten Takalar. Ibu Kota Kecamatan Sanrobone terletak di Desa

Sanrobone yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, dan Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. Luas Wilayah Kecamatan Sanrobone sekitar 29,36 Km bujur sangkar atau sebesar 5,18 persen dari total luas Kabupaten Takalar yang terdiri dari 6 Desa. Jumlah Penduduk di Kecamatan Sanrobone adalah 14.973 Jiwa.

Kecamatan Sanrobone merupakan salah satu kecamatan dari sembilang kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar. Pada tahun 2007 tanggal 27 april terbentuklah Kecamatan Sanrobone dari hasil pemekaran Kecamatan Mappakasunggu, dari kesembilang kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar membawahi sejumlah 82 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk 252,275 jiwa.

Berdasarkan potensi yang dimiliki, permasalahan serta berbagai keterbatasan yang dihadapi Kecamatan Sanrobone, maka ditetapkan visi Pembangunan Kecamatan Sanrobone yaitu "Terciptanya Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Yang

Sejahtera ". Berdasarkan visi pembangunan kecamatan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kecamatan Sanrobone sebagai berikut: Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran, Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan, Memberdayakan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut, seksi ketentraman dan ketertiban umum di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, pelaksanaan Kantibmas dan keamanan lingkungan kemasyarakatan serta pengembangan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya tidak saling mengganggu dari setiap elemen masyarakat yang ada.

Seksi perekonomian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan

retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan.

Keterlibatan Partisipasi

Keterlibatan partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan dapat dilihat melalui Partisipasi langsung yaitu apabila individu menampilkan aktivitas tertentu dalam proses partisipasi, sedangkan keterlibatan melalui partisipasi tidak langsung yaitu apabila individu melimpahkan hak partisipasinya sedangkan partisipasi tidak langsung yaitu masyarakat tidak langsung ikut berpartisipasi dalam penyampaian usulan usulan atau saran yang dibutuhkan.

Kebijakan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar adalah partisipatif dengan melibatkan komponen lapisan masyarakat di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dengan tetap memperlihatkan tata nilai, budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu fungsi *bottom up strategy* dalam proses perencanaan pembangunan. Sehingga tercipta relevansi yang memadai antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan hasil perencanaan pembangunan yang menjadi tujuan bersama antara

masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan perencanaan tersebut maka di perlukan dua indikator dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa antara lain: keterlibatan dan tingkat partisipasi.

Tingkat Partisipasi

Memiliki indikator pokok yaitu kehadiran, penyampaian ide, kesediaan bertanggung jawab. Kehadiran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh pemerintah setempat karena pembangunan yang akan dilaksanakan bukan hanya bagian dari proyek pemerintah tetapi adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan pihak-pihak terkait. Kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi di semua tahap-tahap pembangunan khususnya dimulai dari perencanaan untuk menentukan apa yang menjadi prioritas utama perencanaan pembangunan nantinya. Penyampaian ide adalah keterlibatan masyarakat dalam penyampaian gagasan maupun saran dari masyarakat, dalam kegiatan musrenbang. Masyarakat perlu memberikan ide untuk kelancaran kegiatan tersebut. Untuk melihat jalannya suatu pembangunan maka partisipasi dan kerjasama pihak pemerintahan dan masyarakat sangatlah

penting mulai dari perencanaan sampai pada tingkat evaluasi agar tanggung jawab dari masing-masing pihak terlaksana dengan optimal.

Kehadiran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh pemerintah setempat karena pembangunan yang akan dilaksanakan bukan hanya bagian dari proyek pemerintah tetapi adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan pihak-pihak terkait. Kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi di semua tahap-tahap pembangunan khususnya dimulai dari perencanaan untuk menentukan apa yang menjadi prioritas utama perencanaan pembangunan nantinya.

Penyampaian ide adalah keterlibatan masyarakat dalam penyampaian gagasan maupun saran dari masyarakat, dalam kegiatan musrenbang. Masyarakat perlu memberikan ide untuk kelancaran kegiatan tersebut. Masyarakat harus banyak memberikan usulan untuk kegiatan musrenbang karena banyak masyarakat yang mengeluh tentang pembangunan untuk mengetahui program-program tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : Partisipasi langsung adalah partisipasi ini terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi ini terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Perencanaan pembangunan partisipatif menurut Hanif Nurcholis, (2008) adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat.

Kehadiran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh pemerintah setempat karena pembangunan yang akan dilaksanakan bukan hanya bagian dari proyek pemerintah tetapi adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan pihak-pihak terkait. Penyampaian ide adalah keterlibatan masyarakat dalam penyampaian gagasan maupun saran dari masyarakat, dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Ketersediaan

bertanggung jawab adalah keterlibatan masyarakat serta kesediaannya untuk ikut bertanggung jawab atas segala usaha mengambil bagian dalam segala aktifitas pembangunan di Kecamatan Sanrobone.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Septia Nugraha.2017. "Efektifitas Pelayanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung".Jurusan Ilmu Pemerintahan.Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ahmad Haryadi: *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan* Volume 4 Nomor 3 (2016) Jurnal Administrasi Negara, 2013 Volume 1 Nomor 4
- Azhar, Fikri. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3 Nomor 2.
- Aprianto,2016."Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Yang Partisipatif Di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat". Skripsi.
- Arifin. 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Sumber [http://repository.usu.ac.id/pdf/Diakses pada tanggal 20 Maret 2017](http://repository.usu.ac.id/pdf/Diakses_pada_tanggal_20_Maret_2017).
- Dikko Alrakman.2013," *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kelurahan Di Kecamatan Cipayung Kota Depok*.Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia".Skripsi.
- Fikri azhar: *Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan* Volume 3 Nomor 2 (2015).
- Ikhsan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makalah Metode Kualitatif. Makassar.
- Isbandi.2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*.Depok: FISIP UI Press.
- Mappamiring.2011.*Pembangunan Partisipatif dalam Perspektif Manajemen Pemerintahan*. Yapma: CV. Berkah Utami.
- Nawawi Juanda, 2012. *Membangun Kepercayaan dalam mewujudkan good governance*. Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan Vol.1 No.3. Diakses pada tanggal 14 September 2017.
- Nasarani, Porisa Pebria. 2014. *Analisis Implementasi Participatory Public dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar*. Volume 3 Nomor 1.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Kepemerintahan yang Baik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyah. 2010. *Macam Partisipasi*. Makassar pada 3 Februari 2017 (PP Nasarani-2014-ejournal. Unesa.ac.id)
- Sugiyah.2001.*Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*.PPs-UNY.
- Sukardi, Ahmad. 2009. *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Wandi Saputra, 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang. Skripsi.